

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada konteks ilmu hubungan internasional seringkali terdengar istilah normalisasi. Istilah normalisasi pada dasarnya memiliki beragam pengertian dan kegunaan, namun pada buku *Discipline and Punish* konsep normalisasi dapat diartikan sebagai keterlibatan konstruksi norma perilaku dimana normalisasi dapat membuat orang menjadi homogen dan digunakan sebagai taktik dalam menerapkan kontrol sosial (Foucault, 2023). Sejarah dari kata normalisasi muncul pada tahun 1800 pada bidang ilmu kesehatan dan digambarkan sebagai “*a return to normalicy*”. Namun dalam konteks ilmu sosial dan politik istilah normalisasi sering diartikan sebagai upaya memulai kembali suatu hubungan kerjasama dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan hubungan baik dengan aktor-aktor politik. Menurut Abar Barston normalisasi dapat didefinisikan sebagai proses dalam meraih dan mewujudkan kesepakatan bersama dengan tujuan bersama untuk mengakhiri konflik melalui beberapa upaya seperti gencatan senjata, perjanjian perdamaian atau menciptakan hubungan diplomatik (SYAFITRA, 2022). Normalisasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meminimalisir konflik, pergesekan, ataupun perpecahan yang terjadi. Maka dapat dikatakan bahwa normalisasi merupakan hal penting dalam tatanan politik internasional guna menjaga stabilitas keamanan dunia internasional. Dalam melakukan upaya normalisasi para aktor seringkali melakukan negosiasi diplomatik, melakukan kunjungan resmi yang dihadiri oleh perwakilan, ataupun membuat suatu perjanjian dalam rangka memperkuat kepastian satu sama lain.

Bentuk normalisasi pada hubungan internasional adalah seperti yang terjadi antara Iran dengan Arab Saudi. Normalisasi yang terjadi antara Iran dengan Arab Saudi merupakan suatu kejutan pada tatanan dunia internasional. Hal tersebut karena diketahui bahwa Iran dan Arab Saudi merupakan dua rival besar kawasan Teluk Persia yang telah mengalami konflik panjang atas

perebutan kekuasaan. Adapun keduanya pernah memiliki hubungan yang baik saat Iran berada dibawah kepemimpinan kekuasaan Syah Reza Pahlevi dan Arab Saudi berada dibawah kepemimpinan Raja Khalid. Akan tetapi hubungan keduanya semakin memburuk karena adanya perbedaan agenda politik yang menyebabkan Arab Saudi cenderung lebih dekat kepada Amerika Serikat dan Iran cenderung lebih dekat kepada Rusia dan China. Selain itu perbedaan pemahaman agama (sektarianisme) masing-masing negara seperti Arab Saudi merupakan negara dengan mayoritas penduduknya pemeluk Islam Sunni dan Iran mayoritas penduduknya pemeluk Islam Syi'ah menjadi pemicu keretakan hubungan kedua negara tersebut. Retaknya hubungan keduanya disebabkan karena adanya agenda program nuklir Iran yang dipandang sebagai suatu ancaman bagi kawasan Teluk hingga Timur Tengah dan dapat menggeserkan posisi geopolitik Arab Saudi. Dimana pengembangan nuklir Iran sudah berlangsung sejak tahun 1953 dibawah kepemimpinan Syah Reza Pahlevi dan mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat melalui perjanjian kerjasama nuklir sipil dari program "*atom for peace*" (Sundari, 2019), akan tetapi karena adanya revolusi Iran tahun 1979 menyebabkan beralihnya kepemimpinan Syah Reza Pahlevi menjadi kepemimpinan Khomeini yang menimbulkan adanya kecurigaan negara barat terhadap aktivitas nuklir Iran, maka Amerika Serikat berubah menjadi negara yang menentang program nuklir tersebut karena dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan dan dikhawatirkan akan memunculkan rezim pembangkang yang menentang peraturan dan kebijakan Amerika Serikat. Hal itu karena saat Iran dibawah kepemimpinan Khomeini, Iran dengan jelas menentang dan sangat anti terhadap barat khususnya Amerika Serikat (Sundari, 2019).

Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979 dianggap sebagai suatu ancaman bagi Arab Saudi, hal ini karena Arab Saudi merasa bahwa eksistensi negaranya terancam atas adanya revolusi Iran yang memberikan harapan dan pandangan kepada negara kawasan atas keselamatan keamanan geopolitik kawasan serta menuntut adanya keadilan serta menegaskan penolakan politik negara-negara barat (Mustahyun, 2017). Lalu adanya konflik yang terjadi antara Iran dengan negara barat Amerika Serikat menyebabkan Arab Saudi semakin

perlu untuk berantisipasi dalam menghadapi kekuatan Iran. Maka dari itu setelah adanya revolusi Iran hubungan keduanya mengalami konflik pasang surut hingga puncaknya pada tanggal 2 Januari 2016 yaitu karena adanya tindakan eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap ulama Syi'ah terkemuka yaitu Syekh Nimr al-Nimr, hal ini karena adanya dugaan aksi terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan Arab Saudi (BBC, 2016). Tindakan eksekusi mati ulama Syi'ah tersebut menimbulkan kemarahan bagi masyarakat Iran dan menimbulkan aksi protes yang dilakukan dengan penyerangan terhadap kantor kedutaan besar Arab Saudi di Teheran, Iran. Dalam aksi tersebut terdapat sebuah ancaman pembunuhan staf kedutaan besar Arab Saudi di Teheran, terdapat kurang lebih 2000 orang yang membawa beberapa perlengkapan bom yang nantinya akan dilemparkan ke arah kantor kedutaan besar Arab Saudi. Aksi tersebut tidak hanya dilakukan di kantor kedutaan besar saja melainkan masyarakat melakukan penyerangan ke kantor konsulat Arab Saudi yang terletak di Mashhad (Prasetyo et al., 2016).

Nimr ditangkap dan diadili oleh pemerintah Arab Saudi karena Nimr telah menunjukkan tindakan-tindakan pemberontakan radikal. Akibat aksinya tersebut Nimr yang saat itu umur 54 tahun dijatuhkan hukuman mati oleh pihak otoritas Arab Saudi pada 15 Oktober 2014. Kendati demikian sebenarnya pihak Arab Saudi sudah mengetahui konsekuensi yang akan terjadi dimana hal tersebut akan membuat pergolakan hubungan negaranya dengan Iran, namun disatu sisi jika pihak Arab Saudi tidak melakukan tindakan tersebut maka akan adanya kekecewaan masyarakat sunni Saudi dan adanya pandangan bahwa Arab Saudi tidak berani dalam menindak Nimr demi keamanan negaranya. Hingga tepat pada tanggal 2 Januari 2016 Nimr dieksekusi oleh pihak Arab Saudi, dan mendapatkan kecaman yang serius dari Iran (BBC News, 2016). Lalu dalam situasi aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Iran terhadap kantor kedutaan besar dan kantor konsulat Arab Saudi di Teheran, konsulat jenderal Arab Saudi telah meminta perlindungan terhadap pemerintah Iran, namun tidak adanya respon yang diberikan oleh pemerintah Iran, hal itu diperparah dengan adanya pemutusan aliran listrik pada kantor kedutaan besar dan kantor konsulat Arab Saudi selama satu jam, sehingga membuat para

diplomats and staff difficulties to request assistance. As a result of the attack on the Iranian community in that region, the Saudi Arabian government was very disappointed that there was no response or protective action taken by the Iranian government at that time, so the Saudi Arabian government took a decision to sever diplomatic relations with Iran because the action had disrupted national security. Saudi Arabian Foreign Minister Adel al-Jubeir gave a deadline to all Iranian representatives or diplomats still in Saudi Arabia to leave the country within two days. On January 3, 2016, the Saudi Arabian government expelled all Iranian diplomats from the country. Not only that, the Saudi Arabian government reported the matter to the UN Security Council, the Arab League, and the Organization of Islamic Cooperation (Tejomukti, 2016).

As for the decision to sever diplomatic relations taken by Saudi Arabia against Iran, it was followed by several Gulf region countries such as Kuwait, Bahrain, and the United Arab Emirates where these countries took steps to sever or downgrade diplomatic relations with Iran as a way of supporting Saudi Arabia (Prasetyo et al., 2016). The actions taken by these countries were not only a sign of solidarity support but also a sign of fear of the conflict that was occurring between the two major powers in the Gulf region. As time went on, the tension between Iran and Saudi Arabia increased, especially with the resumption of relations between Iran and Qatar in the middle of the Qatar crisis, namely the decision to sever diplomatic relations between Gulf countries such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Qatar with Iran, and the possibility of providing financial aid to terrorist organizations. Gulf region countries are concerned that Iran has taken actions that violate international agreements in the context of security because it is unable to protect Saudi diplomats. Knowing this, Iran sent a letter to the UN Security Council stating that the Iranian government

maupun masyarakat merasa menyesal akan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu kedua negara tersebut serta beberapa negara mitranya melakukan usaha dalam menciptakan hubungan baik antar Iran dan Arab Saudi. Langkah pertama dalam upaya normalisasi hubungan keduanya diawali pada keterlibatannya pada *good offices* Swiss dengan mempertemukan Didier Burkhalter yaitu Menteri Luar Negeri Swiss dengan Javad Zarif yaitu Menteri Luar Negeri Iran pada tanggal 21 Januari 2016 di *World Economic Forum* yang menghasilkan Didier Burkhalter menyetujui sebagai perwakilan Iran atas permohonan Iran. Lalu pada 14 Februari 2016 Raja Salman bin Abdulaziz al Saud bertemu dan melakukan perundingan dengan Didier Burkhalter (Rafsanjani, n.d.). Setelah pertemuan tersebut Irak memberikan ketersediannya sebagai mediator dalam forum KTT yang dilaksanakan di Baghdad pada 20 April 2019 dan membuahkan hasil positif dimana Muhammad bin Salam yakni Putra Mahkota Arab Saudi mengundang Adel Abdul Mahdi selaku Perdana Menteri Irak untuk bertemu pada tanggal 1 Oktober 2019 di Riyadh dan menghasilkan permintaan Arab Saudi untuk memberikan fasilitas dalam upaya normalisasi dengan Iran (Rafsanjani, n.d.). Lalu berlanjut pada bulan April 2021 dimana pejabat keamanan senior Iran yakni Ali Shamkhani dan Arab Saudi yakni Khalid bin Ali Al Humaidan melakukan upaya pembicaraan di Irak dalam upaya pemuliham, lalu berlanjut setelah putaran pembicaraan pada September 2021 kedua belah pihak menunda dialog sambil menunggu pembentukan pemerintahan baru di Irak. Pada tahun 2022 setelah jeda selama 7 bulan, delegasi Iran dan Saudi akhirnya melanjutkan pembicaraan di Irak sampai pada akhir April (Betul Dogan Akkas, 2023). Lalu tepatnya pada tanggal 10 Maret 2023 dimana Iran dan Arab Saudi secara resmi memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik kedua negaranya setelah kurang lebih tujuh tahun terputus, dengan ditunjuknya Wang Yi yaitu diplomat China sebagai mediator (Sidik, 2023). Tentunya peran yang diambil oleh China adalah hal yang baik karena negara Tirai Bambu tersebut telah memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan kedua negara, serta terdapat kepentingan ekonomi China pada kawasan Teluk Persia sehingga China sangat bergantung pula pada stabilitas kawasan tersebut.

Adapun motivasi normalisasi yang terjadi antara Iran dengan Arab Saudi ini dilatar belakangi atas kepentingan masing-masing negaranya seperti Arab Saudi dengan Visi Arab Saudi 2030 yang berencana untuk mengurangi ketergantungan negaranya pada sektor minyak sehingga perlu memulai hubungan yang baik dengan Iran dalam rangka meningkatkan dan membuka peluang investasi (Aulia & Zaman, 2024), selain itu adanya kemerosotan hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat atas adanya tuduhan terhadap Putra Mahkota Arab Saudi yakni Mohammed bin Salman terlibat atas insiden pembunuhan Jamal Khashoggi (Frank Gardner, 2021) menyebabkan kekhawatiran Arab Saudi atas keamanan negaranya sehingga Arab Saudi perlu menciptakan hubungan yang baik dengan Iran demi menjaga stabilitas keamanan kewasannya. Sedangkan Iran sendiri memiliki kepentingan karena negaranya sedang menghadapi krisis ekonomi akibat dari sanksi isolasi yang diberikan oleh Amerika Serikat sehingga menyebabkan keterbatasan Iran dalam melakukan perdagangan dan kerjasama bisnisnya hingga akhirnya Iran mengalami krisis ekonomi dan mendapatkan sentimen dari negara-negara barat, terlebih Arab Saudi merupakan sekutu Amerika Serikat sehingga Iran akan mengalami kerugian karena pasokan minyak dunia dialokasikan oleh Arab Saudi (Anwar, n.d.). Maka dalam konteks ini dapat dilihat bahwa pemutusan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara tersebut didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negaranya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang melatarbelakangi normalisasi hubungan antara Iran dengan Arab Saudi, lalu didalamnya akan menganalisis bagaimana peranan China yaitu sebagai negara mediator sehingga terjadinya hubungan normalisasi Iran dan Arab Saudi. Serta didalamnya akan menganalisis pula implikasi yang terjadi akibat hubungan normalisasi Iran dan Arab Saudi terhadap geopolitik kawasan Teluk Persia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka timbul beberapa identifikasi masalah yaitu:

- 1). Bagaimana latar belakang normalisasi yang terjadi antara Iran dan Arab Saudi?
- 2). Bagaimana peran China dalam mendorong terjadinya hubungan normalisasi antara Iran dan Arab Saudi?
- 3). Bagaimana kendala normalisasi yang terjadi antara Iran dan Arab Saudi?
- 4). Bagaimana implikasi yang terjadi akibat hubungan normalisasi antara Iran dan Arab Saudi terhadap geopolitik Kawasan Teluk Persia?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan pembahasan yang akan diangkat agar lebih efisien dan dapat ditinjau lebih mendalam maka penulis membatasi masalah pada dampak hubungan normalisasi kembali antara Iran dengan Arab Saudi dan bagaimana implikasi terhadap faktor geopolitik, dan keamanan kawasan Teluk Persia Tahun 2023.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk mengetahui latar belakang atas terjadinya normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi.
- 2). Untuk menganalisis bagaimana peran China dalam upaya normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi.
- 3). Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi atas normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi.
- 4). Untuk mengetahui dampak atas normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi terhadap dinamika politik Kawasan Teluk Persia.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan penulis terkait persoalan yang terjadi di kawasan Teluk Persia khususnya antara Iran dan Arab Saudi.
- 2). Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap disiplin ilmu hubungan internasional.
- 3). Untuk memenuhi syarat ujian program Strata Satu (SI) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.